

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China bermula sejak masa kampanye Trump, ketika ia menyatakan komitmennya untuk menerapkan kebijakan proteksionis guna melindungi perekonomian domestik Amerika Serikat melalui penerapan tarif terhadap barang yang masuk maupun keluar dari negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional ini mencakup langkah-langkah dalam sektor ekspor dan impor, di mana pemerintah Trump mengenakan tarif terhadap produk asal China sebagai upaya menekan dominasi produk China di pasar Amerika Serikat serta mengurangi defisit neraca perdagangan nasional. Konflik dagang ini semakin meningkat pada 8 Maret 2018, ketika Trump secara resmi memberlakukan tarif impor sebesar US\$34 miliar terhadap barang-barang dari China. Produk seperti televisi dan alat medis dikenakan tarif impor sebesar 25%. Sebagai balasan, pemerintah China juga menerapkan tarif serupa terhadap lebih dari 500 produk asal Amerika Serikat, dengan nilai total mencapai US\$34 miliar, termasuk daging sapi, susu, makanan laut, dan kedelai (Haniifah & Sefriani, 2025).

Pada tahun 2019, eskalasi tarif Amerika Serikat memuncak hingga 25% pada barang China senilai US\$200 miliar. Lalu, China membalas atas kegagalan realisasi pembentukan kesepakatan Phase One (CNN Indonesia 2020). Periode 2020-2024 pada era Biden menunjukkan jeda yang cukup relatif, walaupun tarif tetap dipertahankan dengan penekanan pada pembatasan ekspor teknologi seperti chip semikonduktor serta

larangan terhadap Huawei. Trump mengenakan tarif 10% pada semua ekspor China pada Februari 2025, lalu China membalas dengan tarif 15% untuk batu bara hingga minyak. Sampai akhirnya, tarif Amerika Serikat dan China menjadi 84% satu sama lain, dan Trump menambah tarif 100% plus kendali pada bulan Oktober setelah gencatan senjata sementara dan negosiasi London pada bulan Mei-Juni (Anto Kurniawan, 2025).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China memberikan dampak pada aspek sosial dan ekonomi secara global, khususnya pada tarif tinggi yang mengganggu rantai pasok dan perdagangan. Pertumbuhan PDB global melambat menjadi 0,4% dalam jangka panjang akibat penurunan ekspor dan impor bilateral antara Amerika Serikat dan China dengan efek domino ke negara mitra seperti ASEAN. Inflasi naik secara signifikan, contohnya, 5,5% di Amerika Serikat karena kenaikan biaya impor. Di sisi lain, ekspor Amerika Serikat turun hingga 17%. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian yang menjalar ke depresiasi mata uang di negara berkembang seperti rupiah hingga 10-11% (Grace Helena A et al., 2025).

Kawasan ASEAN terkena dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Secara umum, ASEAN mengalami tekanan rantai pasok perdagangan global, walaupun tetap mendapatkan peluang alih impor dan relokasi industri dari China. Dampak ekonomi makro terhadap ASEAN dapat dikatakan masih terlindungi, Hal ini karena Trump hanya memberikan dampak relatif kecil dengan menaikkan PDB dan kesejahteraan di sebagian besar

negara ASEAN. Namun, ada penurunan neraca perdagangan akibat impor yang lebih besar dari China (Dwi Yulianto & Tri Widodo, 2018).

Perubahan pola perdagangan dari China ke beberapa negara ASEAN juga menjadi salah satu dampak dari peristiwa perang dagang kedua negara adidaya ini. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan ingin mengurangi ketergantungan tarif Amerika Serikat terhadap China (Rifka Aulia, 2022). Selain itu, perang dagang Amerika Serikat dan China ini mendorong negara ASEAN untuk mengambil tindakan *hedging* dan memperkuat ASEAN-centrism untuk menjaga keutuhan keberlanjutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Peralihan investasi dan produksi juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur ASEAN, walaupun berpotensi menimbulkan ketimpangan regional di dalam negeri masing-masing negara jika kebijakan distribusi tidak diterapkan dengan baik (Adventia Chelsea Numitha & Maria Carmelian Hillary Harapan, 2026). Secara komparatif, Vietnam, Malaysia, dan Thailand tampak lebih diuntungkan oleh relokasi industri dan lonjakan ekspor produk pengganti dari China ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia mengalami dampak yang lebih ringan karena mampu memanfaatkan kesempatan perubahan dalam perdagangan global, tetapi masih terpengaruh oleh penurunan nilai rupiah serta gangguan rantai pasokan (Erwidodo et al., 2020).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, di mana lebih dari separuh penduduknya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti nikel, kelapa sawit, dan gas alam.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam, yang menjadi salah satu basis penting dalam aktivitas ekonomi nasional dan perdagangan internasional. Potensi tersebut mencakup komoditas strategis seperti nikel, kelapa sawit, batu bara, serta berbagai sumber daya mineral lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan permintaan tinggi di pasar global. Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan ekspor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mendorong penguatan industri berbasis sumber daya melalui kebijakan hilirisasi agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan nilai tambah domestik. Kondisi tersebut menjadi penting ketika Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan perubahan pola perdagangan akibat rivalitas ekonomi antara negara-negara besar. Hal tersebut mendukung sistem perekonomian, khususnya berbasis SDA dan manufaktur, sebesar US\$1,4 triliun pada 2025. Kondisi ekonomi Indonesia tumbuh kuat 5,11% sepanjang 2025 dengan dorongan ekspansi manufaktur, inflasi terkendali, dan surplus neraca perdagangan. Teta pada tantangan utama dalam kondisi perekonomian Indonesia yang meliputi ketergantungan ekspor komoditas sebesar 40% dan utang publik sebesar 39% PDB (Ramdan Denny Prakoso, 2026). Peristiwa perang dagang Amerika Serikat dengan China sejak 2019 hingga 2025 telah mengganggu rantai pasok Indonesia yang bergantung pada impor bahan baku dari China, seperti elektronik dan mesin, serta ekspor tekstil dan nikel ke Amerika Serikat dan China,

yang akhirnya menyebabkan penurunan permintaan ekspor hingga 15% (Utami Fahmi, 2025).

Implikasi strategis Indonesia cukup krusial dalam peristiwa perang dagang ini, Amerika Serikat dan China menuntut sistem hedging berbasis prinsip bebas aktif. Pilar utama dalam negosiasi menggunakan diplomasi ekonomi proaktif dengan Amerika Serikat dengan menggunakan surplus dagang US\$18 miliar sebagai bargaining chip, sekaligus meningkatkan produk Amerika Serikat demi menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia memainkan kedua sisi sekaligus tanpa memihak pada salah satu *power*. FDI China dimanfaatkan sambil menjaga akses perdagangan ke Amerika Serikat. Posisi Indonesia sebagai negara *middle power* digunakan untuk peluang membangun *self-reliance* melalui SDA krusial (Media DPR RI, 2025).

Melihat puncak dinamika perang dagang Amerika Serikat dan China yang diawali dengan strategi proteksionis Trump pada tahun 2018 hingga tarif brutal senilai 84-100%, tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakpastian global terus menggerus sistem ekonomi Indonesia. Penurunan ekspor 15% akibat disrupsi rantai pasok menjadi salah satu efek *spillover* di Indonesia. Kerentanan SDA merupakan bukti dampak volatilitas global. Hal ini dikarenakan posisi *middle power* Indonesia menjadi titik kritis geoekonomi yang terjepit di antara dua raksasa ekonomi. Maka, terdapat urgensi dalam penelitian ini, yaitu untuk menyusun serta menilai secara sistematis *spillover effect* perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2019-2026 terhadap Indonesia serta menilai sejauh mana pendekatan *self-reliance* bekerja sebagai strategi

untuk mengurangi dampak ekonomi dan politik. Hal ini agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan memperkecil risiko di tengah ketidakpastian global secara maksimal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka muncul pertanyaan riset yang ingin menjawab “Seberapa efektif strategi self-reliance Indonesia dalam menghadapi spillover effect pasca perang dagang Amerika Serikat dan China 2019-2026”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perang dagang Amerika Serikat dan China periode 2019-2026 terhadap perdagangan dan perekonomian Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas strategi *Self-Reliance* Indonesia dalam merespons dampak tersebut.

Tujuan Khusus

1. Menganalisis dinamika proteksionisme perang dagang Amerika Serikat dan China periode 2019-2026 serta dampaknya terhadap perdagangan Indonesia hingga global.

2. Mengidentifikasi pengaruh ketegangan bilateral antara Amerika Serikat dan China terhadap sirkulasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
3. Menganalisis dan mengevaluasi strategi *self-reliance* pemerintah Indonesia terhadap diversifikasi ekspor komoditas pertanian dalam perspektif neomerkantilisme untuk mengendalikan neraca perdagangan dan memitigasi efek *spillover* perang dagang Amerika Serikat dengan China.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan *hedging* berbasis neo-merkantilisme bagi Indonesia sebagai negara *middle power*, dengan harapan untuk memaksimalkan keamanan ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi proaktif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis, harapannya adalah penelitian ini dapat memperluas cakupan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai isu keamanan ekonomi nasional di tengah proteksionisme global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2019-2026 yang memengaruhi arus perdagangan global serta pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui trade diversion dan disrupsi rantai pasok. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan relasi antaraktor domestik, regional, dan internasional, yaitu Amerika Serikat dan China sebagai raksasa ekonomi. Hal ini lantas

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi geoekonomi strategis sebagai negara *middle power* dengan kekayaan SDA yang melimpah. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional, khususnya dalam perspektif neo-merkantilisme untuk merumuskan strategi *self-reliance* dan diplomasi ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berharap dapat berkontribusi dalam menambahkan wawasan baru bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk merumuskan kebijakan perdagangan adaptif seperti diversifikasi ekspor komoditas pertanian, guna melindungi industri domestik dari spillover perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Penelitian menunjukkan bahwa ketegangan perdagangan dapat memengaruhi aliran investasi asing dan stabilitas pasar modal. Memahami dinamika ini penting bagi investor dan pengelola aset untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Secara keseluruhan, penelitian tentang dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perdagangan global, tetapi juga membantu dalam pengembangan strategi kebijakan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka/Review Literatur

Dalam mengkaji penelitian *spillover effect* bagi Indonesia pasca perang dagang Amerika Serikat dan China tahun 2019-2026, khususnya dalam tinjauan Neo-Merkantilisme sebagai analisis strategi *self-reliance* Indonesia di tengah ketidakpastian global, penulis telah mengumpulkan lima penelitian terdahulu sebagai rujukan utama dalam penyusunan proposal ini. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan erat dengan topik yang akan diteliti. Penelitian pertama merupakan artikel jurnal yang berjudul **Dampak Perang Dagang Antara Amerika Serikat dan China terhadap Ekspor Indonesia** oleh Rudi Purwono tahun 2022 yang menjelaskan dampak negatif perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap sirkulasi perdagangan internasional, khususnya terhadap Indonesia. Menurut Rudi Purwono, perubahan tarif antara Amerika Serikat dan China sejak 2018 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan global, tidak hanya memengaruhi negara-negara utama yang terlibat, tetapi juga menimbulkan efek *spillover* pada negara-negara dalam Rantai Nilai Global (GVC), termasuk Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang terkait dengan GVC meningkat dari tahun 2000 hingga 2014, dengan tingkat tarif domestik sebesar 82-85%. Namun, sebagian besar PDB Indonesia terdiri dari bahan baku, yang sangat dipengaruhi oleh impor dari negara lain. Jika Indonesia menggunakan bahan baku tersebut sebagai input untuk ekspor ke Amerika Serikat melalui China, tarif yang dikenakan dapat menghambat impor dari Indonesia, yang berpotensi menyebabkan penurunan ekspor. Selain itu, dampak tarif

terhadap perdagangan Amerika Serikat dan China relatif kecil jika dinilai dari perspektif ekspor bernilai tambah. Namun, Indonesia terpapar risiko eksternal akibat perannya dalam lingkungan perdagangan global dan sensitivitas impornya terhadap produk eksportnya. Maka, hal ini dapat ditekankan bahwa pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan tarif domestik untuk meredam dampak ekonomi bagi Indonesia selama gangguan perdagangan global (Purwono R et al., 2022).

Penelitian kedua berjudul **Dinamika Perang Ekonomi Amerika Serikat dan China: Dampak Tarif dan Strategi Balasan di Era Globalisasi Tahun 2025** karya Doianto Kogoya menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji perang dagang Amerika Serikat dengan China yang memuncak, khususnya dampak langsung dari kebijakan tarif tersebut terhadap perdagangan bilateral, sektor industri, serta rantai pasok global di tengah negara yang saling ketergantungan. Penulis berpendapat konflik ini dipicu oleh ketidakseimbangan neraca perdagangan yang sangat besar. Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan China mencapai sekitar US\$419,5 miliar pada 2018. Lalu, Amerika Serikat mulai memperluas daftar barang impor China yang dikenai tarif, termasuk untuk mengurangi defisit perdagangan dan melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Selain itu, China juga sempat melakukan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif impor Amerika Serikat. Maka, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perang dagang ini terdapat strategi proteksionisme dan balasan tarif yang agresif sehingga memberi dampak negatif yang luas, tidak hanya kepada dua negara tersebut tetapi juga kepada perekonomian global secara keseluruhan (Doianto Kogoya, 2025).

Untuk menunjang dua penelitian sebelumnya, terdapat penelitian ketiga yang berjudul **Analisis Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-China Terhadap Ekonomi Politik Indonesia** karya Meilany Dwi Syahfitri et al. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perang dagang di antara kedua negara ini merupakan konflik ekonomi yang dapat menyebabkan suatu negara mengalami penghambatan siklus perdagangan. Kondisi ekonomi Indonesia yang rawan tidak membatasi peluang untuk dianggap sebagai kekuatan besar baru. Dalam konflik antara kekuatan utama di dunia ekonomi dan politik. Dengan demikian, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia untuk pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, sebagaimana yang sudah dibahas dalam teori kebijakan luar negeri Palmer dan Morgan, kebijakan luar negeri akan digunakan untuk mempertahankan kondisi bila ada negara lain yang berusaha mengubah tatanan politik internasional (Meilany Dwi Syahfitri et al., 2024).

Penelitian keempat berjudul **Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme** karya Tuti Rastuti dan Andian Achya Dzikriyyah Khoirudin memaparkan dalam penelitiannya bahwa kebijakan proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membatasi perdagangan internasional secara keseluruhan, termasuk impor. Hal tersebut merupakan perlindungan untuk industri dalam negeri dari persaingan ekspor atau impor produk dari negara lain. Kajian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu kepatuhan hukum Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam WTO, dampak kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian dan stabilitas perdagangan

Indonesia, serta strategi Indonesia dalam memitigasi risiko dan retaliasi dalam dinamika perang dagang global khususnya dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip *World Trade Organization* (WTO). Indonesia terjebak dalam dilema yang kompleks di tengah-tengah kedua negara adidaya yang berkonflik yang telah menerapkan kebijakan proteksionisme yang saling membalas, sedangkan prinsip WTO seperti non-diskriminasi, transparansi, persaingan yang adil dan larangan terhadap proteksionisme sudah menjadi landasan penting dalam perdagangan internasional. Maka, Indonesia berupaya meningkatkan transparansi kebijakan perdagangannya dan memanfaatkan mekanisme WTO untuk menegosiasikan kebijakan yang menguntungkan. Strategi mitigasi yang diterapkan Indonesia berpijak pada prinsip strategic hedging melalui integrasi politik bebas aktif dalam hukum ekonomi internasional (Tuti Rastuti, et al., 2025).

Penelitian terakhir yang berjudul **Perang Dagang Amerika Serikat-China dan Perubahan Neraca Perdagangan Amerika Serikat-China 2018** karya Nadhira Farrassati menjelaskan bahwa defisit neraca perdagangan Amerika Serikat menurut Donald Trump terhadap hubungan dagang dengan China yang begitu besar terjadi karena praktik dagang serta kebijakan China yang kurang adil sehingga terjadi ketimpangan pada hubungan kedua negara. Presiden Amerika Serikat sempat melakukan investigasi untuk mendesak China, namun hasil yang ditemukan tidak mampu menggerakkan China untuk melakukan perubahan apa pun pada kebijakannya. China justru tetap menganggap tidak ada yang salah pada kebijakan serta praktik dagangnya. Teori yang digunakan dalam penelitiannya mengandung konsep

proteksionisme, yaitu merkantilisme. Perdagangan secara proteksionistis merupakan upaya pemerintah dalam melindungi produk dalam negeri, bersaing dalam perdagangan internasional, serta memperkuat perekonomian negara dengan memperkuat daya saing produk domestik terhadap produk luar negeri (Nadhira Farrassati, 2019).

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, penulis telah mengidentifikasi beberapa keterbatasan penting. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada dampak perdagangan serta dinamika ekonomi politik antara Amerika Serikat dan China secara umum, namun hanya sedikit yang menganalisis secara terperinci soal *spillover effect* terhadap Indonesia dalam periode 2019-2026. Meskipun konsep proteksionisme perdagangan dan merkantilisme telah disebutkan, hubungan antara kedua konsep tersebut dengan strategi *self-reliance* Indonesia dalam aspek Neo-Merkantilisme di tingkat kebijakan belum dioperasionalkan secara konseptual maupun empiris. Selain itu, tinjauan pustaka sebelumnya juga belum menyatukan analisis ekonomi makro-*spillover effect* dengan analisis kebijakan ekonomi politik. Maka, penelitian ini berusaha untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan mengevaluasi *spillover effect* dari perang dagang antara kedua negara adidaya ini dari tahun 2019 hingga 2026 terhadap perekonomian Indonesia. Lalu, menganalisis seberapa efektif strategi *self-reliance* Indonesia dalam konteks Neo-Merkantilisme dalam mengurangi dampak buruk dan memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian global.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Teori Neo-Merkantilisme

Merkantilisme mendominasi pemikiran Eropa mengenai kebijakan ekonomi internasional pada abad ke-17 dan ke-18. Keyakinan mendasar para penganut merkantilisme adalah bahwa kebijakan ekonomi internasional pada dasarnya merupakan alat kekuasaan negara. Karena kekuasaan berbeda dengan kemakmuran yang bersifat relatif, para penganut merkantilisme memandang keterlibatan ekonomi internasional sebagai “zero-sum game”: kamu menang, aku kalah. Para penganut merkantilisme juga sangat menghargai produksi dalam negeri serta menyukai surplus perdagangan dan perlindungan terhadap impor. Adam Smith menulis *The Wealth of Nations* pada abad ke-18 sebagai argumen yang mendukung perdagangan bebas, yang bertentangan dengan merkantilisme semacam itu (Martin Wolf, 2026).

Kebangkitan Neo-merkantilisme merupakan perkembangan paling signifikan dalam *International Economic Politics* kontemporer dan hal ini terjadi di negara-negara yang selama tiga dekade terakhir justru menentanginya. Kebijakan industri telah kembali menjadi praktik yang diutamakan untuk subsidi semikonduktor, baterai, energi bersih, dan farmasi di seluruh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok, dan India. Kontrol ekspor terhadap chip canggih dan peralatan pembuatan chip, serta dari sisi lain terhadap mineral kritis dan pengolahan logam tanah jarang. Proses penyaringan investasi memperlakukan modal masuk di sektor-sektor strategis sebagai masalah keamanan, bukan sekadar masalah komersial (Lotusarise, 2026).

Neo-Merkantilisme mungkin juga bisa dikatakan sebagai teori yang lebih fokus pada

perlindungan industri domestik. Terdapat beberapa pemikiran dalam teori Neo-Merkantilisme. Merkantilisme klasik menyamakan kekayaan dengan logam mulia dan mengutamakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Namun, logika bahwa komposisi perdagangan memiliki arti strategis tetap berlaku. Robert Gilpin menafsirkan ulang dari perspektif statis modern dan sebagai jembatan menuju hubungan internasional realis. Ekonomi dunia liberal merupakan pencapaian politik yang berlandaskan fondasi keamanan, biasanya berupa kekuatan dominan yang bersedia menanggung biaya terkait strategi-strategi perdagangannya yang lebih terbuka (Lotusarise, 2026).

Neo-Merkantilisme memiliki peran utama yang sangat dominan dalam mengatur perekonomian, mengelola sumber daya strategis suatu negara serta mengontrol sirkulasi perekonomian dan perdagangan lintas negara untuk kepentingan nasional. Neomerkantilisme memandang perdagangan internasional sebagai suatu persaingan antarnegara. Maka, negara perlu tetap bersikap proteksionis demi menjaga sumber daya strategis dalam rantai nilai perekonomian global. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Gilpin dalam bukunya berjudul *The Political Economy of International Relations*, Gilpin menjelaskan bahwa pasar cenderung menciptakan ketidakmerataan atau *core-periphery* dan ketergantungan. Hal ini memicu respons nasionalis, seperti proteksionisme, untuk melindungi industri domestik. Dalam konteks perang dagang, Gilpin membahas bagaimana kompetisi merkantilisme modern (*Benign Mercantilism*)

melibatkan *Policy Competition* untuk mengamankan sektor *High-Tech* dan pasar ekspor, relevan dengan strategi Indonesia dalam mengalihkan peluang dari disrupsi Amerika Serikat dan China ke industrialisasi lokal dan kemandirian di tengah *Uneven Development* global. Pendekatan ini menjadikan Neo-Merkantilisme sebagai lensa analisis untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengubah ancaman *spillover* menjadi keunggulan kompetitif secara nasional (Robert Gilpin, 1987).

Maka, dapat disimpulkan bahwa teori tersebut meliputi dominasi *nation-state* atau negara-bangsa sebagai aktor ekonomi lokal maupun internasional. Hal tersebut memerlukan kompetisi antarnegara untuk meningkatkan ekspor. Regionalisme menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi nasional, serta pengaruh norma-norma sosial dan politik di kalangan masyarakat suatu negara terhadap kegiatan ekonomi. Landasan teori ini merupakan pengembangan dari pemikiran merkantilisme klasik yang menempatkan kekuatan ekonomi sebagai faktor utama dalam memperkuat posisi, kepentingan, dan daya saing negara dalam sistem perdagangan internasional.

Keterkaitan fenomena dan masalah yang akan dibahas oleh peneliti memiliki relevansi dengan teori Neo-Merkantilisme karena menekankan prioritas kekuasaan negara dan kekayaan nasional melalui intervensi politik dalam pasar. Hal ini akan menjadi dasar analisis Neo-Merkantilisme pada penelitian ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teori ini menganggap bahwa perdagangan merupakan suatu arena konflik bagi suatu negara untuk memperkuat kekuatan militer serta otonomi ekonomi. Hal tersebut serupa dengan bagaimana Amerika Serikat dan China

menggunakan tarif sebagai senjata untuk dominasi relatif. Maka, Neo-Merkantilisme menekankan bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat merespons ketidakpastian global, seperti gangguan rantai pasokan yang dipicu oleh perang dagang dengan menerapkan kebijakan swasembada yang memaksimalkan keuntungan relatif dan meminimalkan kerentanan terhadap dampak yang berkelanjutan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Spillover Effect*

Spillover effect sering dirumuskan sebagai dampak perubahan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lain akibat ketergantungan spasial serta integrasi ekonomi. *Spillover effect* dalam pandangan seorang pakar, yaitu François Perroux, merujuk pada dampak limpahan dari pertumbuhan pada satu wilayah atau pusat ekonomi ke wilayah lain di sekitarnya. Teori ini berasal dari *Growth Pole Theory* yang dikemukakan oleh Perroux pada tahun 1950. Teori ini menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat memberikan dampak positif yang disebut *spread effect* ke wilayah sekitarnya. Selain itu, terdapat *Circular Cumulative Causation* dari Myrdal yang muncul pada tahun 1957 dan menguraikan dua efek sekaligus. Pertama, *spread effect* membantu wilayah miskin untuk berkembang, lalu yang kedua adalah *backwash effect* yang dapat memperburuk keadaan wilayah miskin (Chandra Saniman et al., 2023).

1.6.1.2 Self-Reliance

Istilah *Self-Reliance* dicetuskan oleh Ralph Waldo Emerson dalam sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1841, yang menekankan kepercayaan pada pemikiran, keterampilan, orisinalitas, keyakinan terhadap kemampuan dan kejeniusan diri sendiri, serta hidup berdasarkan dorongan batin. Meskipun pada awalnya konsep tersebut dikemukakan dalam konteks pengembangan diri individu, prinsip *Self-Reliance* dapat diperluas pada tingkat negara, yaitu sebagai kemampuan suatu negara untuk mengandalkan dan mengembangkan kapasitas, sumber daya, serta potensi internalnya sendiri dalam mempertahankan keberlangsungan dan kestabilan kondisi ekonominya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap kekuatan eksternal. Konsep ini menempati posisi sentral dalam wacana pembangunan masyarakat dan terkait dengan istilah-istilah serupa lainnya seperti swadaya, gotong royong, partisipasi masyarakat lokal, dan pembangunan pedesaan. *Self-Reliance* merupakan pembangunan yang berasal dari sumber daya suatu negara sendiri, yang melibatkan penduduknya berdasarkan potensi nilai-nilai budaya dan tradisinya. *Self-Reliance* mengambil landasan dari Teori Ketergantungan Sistem Dunia, yang mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan pada dasarnya terdiri dari melepaskan ikatan-ikatan ketergantungan. Hal tersebut mencakup pembebasan dari kendali eksternal, perbaikan distorsi, dan pencapaian integrasi internal perekonomian nasional (Godwin O. Unanka et al., 2015). *Self-Reliance* didefinisikan sebagai otonomi pengambilan keputusan serta mobilisasi sumber daya secara mandiri oleh negara-negara berkembang guna mengurangi ketergantungan terhadap negara maju, baik secara individu maupun

kolektif (Kempe Ronald Hope, 1983). Ditambahkan bahwa *self-reliance* merupakan kemampuan negara untuk merencanakan serta mengimplementasikan solusi terhadap tantangan pembangunan lokal.

1.6.1.3 Proteksionisme

Dua tokoh paling berpengaruh yang menentang perdagangan bebas pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 adalah Bapak Pendiri Amerika Serikat Alexander Hamilton dan ekonom Jerman Friedrich List. Keduanya mendukung versi argumen industri yang masih berjalan dalam tahap awal (*infant industry*), yang menganjurkan langkah-langkah proteksionis sementara untuk mendorong industri manufaktur dalam negeri di negara-negara yang masih tertinggal dari pemimpin-pemimpin industri seperti Britania Raya. Alexander Hamilton berpendapat bahwa perdagangan bebas tidak dapat diharapkan untuk mendorong kemakmuran Amerika di bawah kondisi global yang ada saat itu. Alih-alih hanya mengandalkan kekuatan pasar, Hamilton mendesak adanya dukungan proaktif dari pemerintah. Ia meyakini bahwa mendorong manufaktur dalam negeri akan membuat Amerika Serikat lebih mandiri secara ekonomi dan aman secara militer. Gagasan proteksionisme tidak pernah lenyap, tetapi kini kembali mendapatkan momentum baru. Amerika Serikat telah memicu perang dagang terhadap negara-negara lain. Akibatnya, tercipta lingkungan perdagangan yang tidak stabil yang mengancam stabilitas ekonomi (Sergio Martinez, 2025).

Negara-negara di seluruh dunia telah merespons dengan langkah-langkah balasan, dan ekonomi global telah memasuki periode ketidakpastian yang tinggi. List

mengembangkan gagasan Hamilton lebih lanjut dalam bukunya tahun 1841 berjudul “The National System of Political Economy”. Ia meyakini bahwa pembangunan ekonomi nasional memerlukan pengembangan *power* yang produktif untuk suatu negara. Ia menegaskan bahwa proteksionisme merupakan prasyarat bagi lompatan industri. Baru setelah mencapai kematangan industri, negara-negara seharusnya membuka diri terhadap persaingan global. Ia menegaskan bahwa Inggris, yang telah terindustrialisasi jauh lebih awal daripada negara-negara Eropa lainnya, baru menganjurkan perdagangan bebas kepada negara lain setelah memastikan keunggulan industrinya. Friedrich List memandang industri sebagai mesin peradaban dan meyakini bahwa perkembangannya membenarkan pengorbanan material sementara. Maka, bagaimanapun pandangan-pandangan di dunia ini, ada asumsi bahwa pemerintah dapat berhasil mengidentifikasi industri-industri yang paling menjanjikan sekaligus mencegah mereka menjadi bergantung pada dukungan negara dan menolak pencabutan dukungan tersebut begitu alasan awal untuk perlindungan tidak lagi berlaku (Sergio Martinez, 2025).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Spillover Effect*

Spillover Effect memberi penekanan pada suatu fenomena transmisi guncangan ekonomi yang terjadi akibat trade war antara Amerika Serikat dan China, yang kemudian memengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia melalui jalur perdagangan, jaringan produksi, dan pasar keuangan. *Spillover Effect* diartikan sebagai

dampak yang terjadi akibat perubahan ekspor dan impor Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok, gangguan pada rantai pasok bahan baku atau komponen industri, fluktuasi nilai tukar rupiah, aliran modal yang masuk atau keluar, serta munculnya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi global. Selain itu, efek *spillover* juga terlihat dari meningkatnya kebutuhan untuk mengembangkan berbagai mitra dagang dan memperkuat kebijakan ekonomi nasional, sebagai cara pemerintah merespons tingginya ketergantungan pada luar negeri. Dengan demikian, efek spillover tidak hanya dianggap sebagai dampak negatif akibat persaingan dagang antara dua negara besar, tetapi juga sebagai tanda bagi Indonesia untuk memperkuat dasar ekonomi dalam negeri agar lebih kuat menghadapi gangguan dari luar. *Spillover Effect* dijelaskan secara eksplisit dalam peristiwa perang dagang Amerika Serikat dan China yang merupakan fenomena transmisi guncangan ekonomi di mana kebijakan tarif dan proteksionisme yang diambil oleh kedua negara adidaya tersebut memengaruhi parameter ekonomi domestik Indonesia. Secara eksternal, *Spillover Effect* digunakan sebagai sinyal peringatan mengenai dinamika ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, hal ini menunjukkan ketergantungan yang berisiko pada pasar eksternal Indonesia, sehingga mendorong perlunya diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi Risiko ketergantungan yang berlebihan (Purwono R et al, 2022).

1.6.2.2 Self-Reliance

Self-Reliance dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis upaya Indonesia dalam memperkuat kapasitas domestik dan mengurangi

kerentanan terhadap ketergantungan eksternal di tengah ketidakpastian ekonomi global. *Self-Reliance* tidak dipahami sebagai kebijakan yang baru muncul sebagai akibat dari perang dagang Amerika Serikat dan China, melainkan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana kebijakan domestik yang telah dirancang sebelumnya dapat diperkuat dan dimanfaatkan dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi internasional. Dalam konteks penelitian ini, *Self-Reliance* dianalisis melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, diversifikasi ekspor, pengurangan ketergantungan terhadap pasar tertentu, serta penguatan sumber pasokan domestik. Salah satu indikator utamanya adalah ketahanan pasokan yang dinilai melalui tingkat swasembada komoditas strategis yang diproduksi oleh industri dalam negeri secara mandiri. Selain itu, indikator lain yang dapat dilihat adalah tingkat ketergantungan pada impor, diversifikasi ekspor, variasi sumber pasokan, kemampuan produksi dalam negeri, kestabilan harga komoditas, serta ketahanan stok nasional (Arif haryana, 2026). Maka, *Self-Reliance* dalam penelitian ini juga ditempatkan berdampingan dengan strategi Hedging, yaitu upaya mempertahankan fleksibilitas hubungan ekonomi dengan berbagai mitra sekaligus mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap satu negara atau pasar. Dengan demikian, *Self-Reliance* berfungsi untuk memperkuat kapasitas internal Indonesia, sedangkan Hedging berfungsi untuk mengelola ketergantungan eksternal dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan China.

1.6.2.3 Proteksionisme

Proteksionisme diposisikan sebagai instrumen kebijakan utama dari strategi *Self-Reliance* untuk mempertahankan industri domestik Indonesia dari efek negatif *spillover* perang dagang dari kedua negara adidaya tersebut. Proteksionisme bukanlah hambatan perdagangan yang irasional, melainkan alat strategis untuk memastikan bahwa surplus ekonomi tetap berada di dalam negeri. Proteksionisme dalam penelitian ini dioperasionalkan untuk menjaga stabilitas pasar domestik dari intervensi negara. Indikatornya adalah tarif dan kuota, kebijakan non-tarif, dan insentif domestik. Maka, dengan menetapkan proteksionisme sebagai unsur fundamental dalam kebijakan penelitian ini, peneliti dapat merumuskan argumen yang logis bahwa risiko *Spillover* dari konflik perdagangan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melindungi pasar.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, kerangka teori, dan operasionalisasi konsep di atas, penelitian ini berargumen bahwa *spillover effect* perang dagang Amerika Serikat dan China mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui strategi *Self-Reliance* yang tidak berorientasi pada autarki, tetapi pada peningkatan kapasitas domestik dan pengelolaan ketergantungan eksternal. Dalam perspektif Neo-Merkantilisme, negara memiliki peran penting dalam mengarahkan sumber daya dan kebijakan ekonomi untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi dan geopolitik. Dalam konteks Indonesia, strategi tersebut tercermin melalui hilirisasi komoditas strategis, penguatan industri

domestik, diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber pasokan tertentu. Namun, penguatan kapasitas domestik tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa Indonesia tetap terintegrasi dalam rantai perdagangan dan investasi global. Oleh karena itu, strategi *Self-Reliance* perlu berjalan berdampingan dengan hedging sebagai mekanisme untuk mengelola ketergantungan eksternal. Hedging diwujudkan melalui diversifikasi mitra dan pasar ekspor, pemanfaatan berbagai kerja sama ekonomi, serta pemeliharaan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, China, dan mitra lainnya secara bersamaan. Dengan demikian, spillover effect dari perang dagang tidak hanya dipahami sebagai sumber kerentanan, tetapi juga sebagai kondisi eksternal yang mendorong Indonesia untuk memperkuat kapasitas domestik sekaligus mempertahankan fleksibilitas dalam hubungan ekonomi internasional. Hubungan antara *Self-Reliance* dan hedging tersebut menjadi dasar analisis penelitian dalam menjelaskan bagaimana Indonesia berupaya memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian dan rivalitas ekonomi global.

1.8 Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif atau pengalaman subjek penelitian, melalui proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif, analitis, dan interpretatif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali makna, pandangan, dan pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah. Dalam Teknik pengumpulan data, dilakukannya metode analisis dokumen seperti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi

mencakup laporan dan kebijakan serta wawancara pada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memahami konteks, perkembangan, dan implementasi suatu program atau kebijakan. Ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan makna baru dari data tanpa terikat pada hipotesis awal.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan hubungan variabel yang saling berkaitan. Penelitian ini biasanya melibatkan pengumpulan data dari survei, laporan ekonomi, dan analisis statistik untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi yang diteliti tanpa manipulasi variabel atau analisis kausal.

1.8.2 Situs penelitian

Dalam penelitian ini, situs penelitian difokuskan pada Indonesia sebagai lokasi utama studi. Pemilihan lokasi tersebut penting untuk menganalisis dampak spillover perang dagang Amerika Serikat dan China terhadap strategi *self-reliance* Indonesia melalui perspektif neo-merkantilisme, sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai respons kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Data primer penelitian mencakup periode 2019 hingga 2026, sementara data pendukung dari periode lain digunakan untuk melengkapi variabel analisis

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemerintah Indonesia selaku aktor utama dalam fenomena ini menjadi subjek penelitian untuk memahami bagaimana strategi *self-reliance* Indonesia di tengah ketidakpastian global pasca perang dagang Amerika Serikat dan China periode 2019-2026 melalui perspektif neo-merkantilisme. Lebih lanjut, penelitian ini berniat untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi *spillover effect* seperti disrupsi rantai pasok, penurunan ekspor nikel dan sawit, serta tekanan eksternal dari proteksionisme bilateral untuk mencapai keamanan ekonomi nasional melalui kebijakan diversifikasi ekspor.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan kontekstual, mencakup narasi tertulis, kutipan kebijakan, laporan resmi, serta analisis media yang merepresentasikan pandangan aktor ekonomi dan pemerintah Indonesia terkait spillover perang dagang Amerika Serikat dan China. Pengumpulan melalui studi dokumen dan tinjauan pustaka bertujuan memahami komprehensif dampak proteksionisme terhadap perdagangan, strategi *self-reliance* seperti diversifikasi ekspor. Dengan demikian, data semacam ini diharapkan mampu memperkuat analisis secara komprehensif dengan tingkat keandalan yang optimal.

1.8.5 Sumber Data

Dalam sumber data, terdapat data sekunder. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini sangat relevan mengingat kompleksitas fenomena yang diteliti serta

ketersediaan berbagai sumber informasi yang dapat diakses, mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain seperti lembaga pemerintah, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan publikasi akademis. Pendekatan ini memastikan pengumpulan data komprehensif untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode penelitian, yang mencakup cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tinjauan Pustaka dan analisis peta perdagangan internasional atau Trade Map dari *International Trade Centre* (ITC). Maka, dalam penelitian ini lebih fokus pada Teknik yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, kebijakan, artikel, buku, arsip, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, data perdagangan, laporan ekonomi, dan pemberitaan media. Pada tahap awal, peneliti akan mengumpulkan data sekunder melalui observasi di situs Trade Map dari *International Trade Centre* (ITC) serta artikel ilmiah atau situs web resmi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti secara mendalam sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memudahkan

pemilihan informasi, fakta, dan variabel yang relevan dengan fenomena yang diteliti, peneliti selanjutnya akan membatasi jumlah data yang telah dikumpulkan. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menarik hubungan antara data dan masalah utama. Pada akhirnya, kesimpulan akan dicapai melalui proses verifikasi yang menyeluruh setelah penyajian fakta-fakta.

1.8.8 Kualitas Data

Peneliti akan mengumpulkan data secara langsung melalui situs resmi dan aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian ini, sesuai dengan standar akademik dan penulisan. Peneliti bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan bisa digunakan secara sah, akurat, dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini mengkaji bagaimana sikap politik memengaruhi kebijakan perdagangan, bagaimana tarif memengaruhi perekonomian kedua negara secara langsung maupun tidak langsung, bagaimana tarif memengaruhi rantai pasokan internasional, serta bagaimana dinamika politik domestik memengaruhi keputusan perdagangan dan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan komprehensif kepada pembuat kebijakan dalam menavigasi kompleksitas perdagangan internasional.